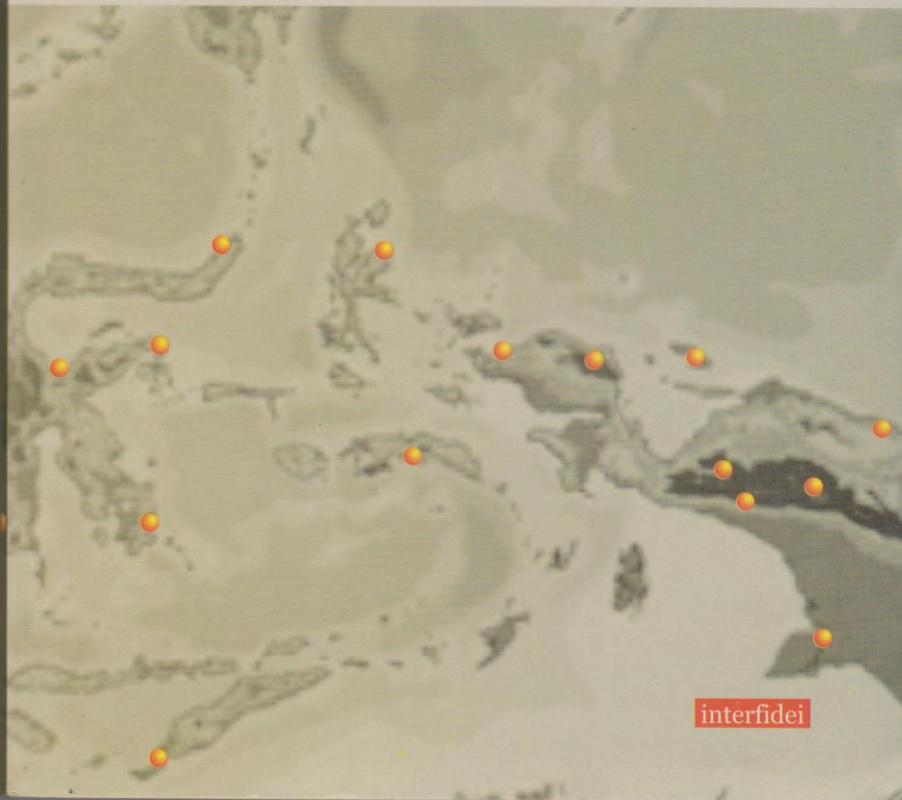


100 ORANG INDONESIA

Angkat Pena
DEMI
DIALOG PAPUA



interfidei

Interfidei
Penerbit

Interfidei

100 ORANG INDONESIA ANGKAT PENAL DEMI DIALOG PAPUA

Editor:
Elga J. Sarapung

Alamat:
Jalan Banteng Utama 59, Yogyakarta 55581- Indonesia
ph: 62-274-880149 - fax: 62-274-887864
website: <http://www.interfidei.or.id>
Email: dianinterfidei@yahoo.com

erbuatan
at (1) dan
g singkat
00 (satu
dan/atau
edarkan,
anggaran
ayat (1)
an/atau
h).

Interfidei

100 ORANG INDONESIA ANGKAT PENALITI DEMI DIALOG PAPUA

Editor: Elga J. Sarapung

Diterbitkan oleh:

Interfidei

Jalan Banteng Utama 59, Yogyakarta 55581- Indonesia
ph: 62-274-880149 - fax: 62-274-887864
website: <http://www.interfidei.or.id>
Email: dianinterfidei@yahoo.com

Kulit Muka & Tata Letak: Agvenda

15,5 x 23 cm; xx + 438 halaman
Edisi I, cetakan ke-1, Juli 2013
ISBN: 979-8726-49-9



Gagasan tentang
melalui berbagai
adalah yang di
kumpulan 54 a
Kebadabi Tebay
dicetak ulang.
kalangan luas,
2012. Peluncur

Salah satu
peluncuran da
yang berisi tul
sampai Aceh.

Kami tah
perkembangan
an di Tanah Pa
Papua perlu d
kekerasan, be
tenang, tanp
mengembang
yang sungguh
sia.

Tulisan c
pengalaman
tentang pikir
untuk meny

DAFTAR ISI

Eiga Sarapung - Pengantar Penerbit	v
Prof. Dr. Daed Joesoef - Pengantar	ix
Dr. Leo Laba Ladjar, OFM - Pengantar	xiii
1. Angela Flassy - (Jayapura, Propinsi Papua)	1
2. Andreas Goo - (Jayapura, Propinsi Papua)	5
3. B. Josie Susilo Hardianto - (Jayapura, Propinsi Papua)	8
4. IGM Sunartha - (Jayapura, Propinsi Papua)	14
5. Latifah Anum Siregar, SH - (Jayapura, Propinsi Papua)	20
6. Leonard Imbiri - (Jayapura, Propinsi Papua)	24
7. Lucky Ireeuw - (Jayapura, Propinsi Papua)	28
8. Dr. Mansur M., SH., MM - (Jayapura, Propinsi Papua)	32
9. Mientje D.E. Roembiak - (Jayapura, Propinsi Papua)	36
10. Nani Uswanas - (Jayapura, Propinsi Papua)	41
11. Dr. Sostenes Sumihe - (Jayapura, Propinsi Papua)	45
12. Yakobus Dumupa - (Jayapura, Propinsi Papua)	50
13. Yan Christian Warinussy - (Manokwari, Propinsi Papua Barat) ..	54
14. Samuel Asse Bless - (Manokwari, Propinsi Papua Barat)	56
15. Dr. Abidin Wakano - (Ambon, Propinsi Maluku)	66
16. Jacky Manuputty, MTh. - (Ambon, Propinsi Maluku)	69
17. Dr. Julianus Mojau - (Tobelo, Halmahera, Propinsi Maluku Utara)	72
18. Dr. Arlina Gunarya - (Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)	75
19. Prof. Dr. M. Qasim Mathar - (Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)	80
20. Dr. Zakaria Ngelow - (Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan)	85
21. Asliah Zainal, S.Ag, S.Pd, M.A. - (Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara)	90

100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua

22	Samsi Pomalingo, MA - (Gorontalo, Propinsi Gorontalo)	95
23	Drs. Abdul Malik Sjahadat - (Tentena-Poso, Propinsi Sulawesi Tengah)	99
24	Lian Gogali, MA - (Tentena-Poso, Propinsi Sulawesi Tengah)	103
25	Prof. Dr. Adolf Sinolungan, SH - (Manado, Propinsi Sulawesi Utara)	108
26	Dr. Nico Gara - (Manado, Propinsi Sulawesi Utara)	112
27	Dr. Yohannis Ohoitumur, MSC - (Manado, Propinsi Sulawesi Utara)	114
28	Roedy Haryo Widjono AMZ - (Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur)	117
29	Dr. Darius Dubut - (Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan)	121
30	Noorhalis Majid, MA - (Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan)	124
31	Dr. Marko Mahin - (Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah)	128
32	Richardus Giring, MA - (Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat)	131
33	Dr. Mery Kolimon - (Kupang, Propinsi NTT)	138
34	Pius Rengka - (Kupang, Propinsi NTT)	145
35	Irfan Suriadiata - (Mataram, Propinsi NTB)	149
36	I Nyoman Sadra - (Tenganan, Karangasem, Propinsi Bali)	154
37	Dr. Hotman M. Siahaan - (Surabaya, Propinsi Jawa Timur)	157
38	Esthi Susanti Hudiono, MA - (Surabaya, Propinsi Jawa Timur)	161
39	Ciciek Farha, MA - (Jember, Propinsi Jawa Timur)	164
40	Joseph Widyatmadja - (Solo, Propinsi Jawa Tengah)	167
41	Tedi Kholiludin - (Semarang, Propinsi Jawa Tengah)	172
42	M. Tafsir - (Semarang, Propinsi Jawa Tengah)	177
43	Dr. Rahayu, SH, M. Hum - (Semarang, Propinsi Jawa Tengah)	180
44	Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera - (Magelang, Propinsi Jawa Tengah)	185
45	Dr. Budi Subanar, SJ - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	188
46	Gusti Kanjeng Ratu Hemas - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	190
47	M. Imam Aziz - (Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	192

PAPUA Dalam Lingkaran *Neo Kanibalisme* Penguasa

Benih-benih neo kanibalisme ala penguasa Indonesia telah mencabik-cabik nilai-nilai kemanusiaan masyarakat Papua.

Samsi Pomalingo¹

SEBAGAI ORANG GORONTALO dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia saya memiliki rasa dan keinginan yang sama untuk hidup dalam suasana kedamaian seperti yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Mereka juga ingin dihargai dan dihormati sebagai bangsa Indonesia. Rakyat Papua ingin hidup lebih dari seribu tahun tanpa penindasan dan teror. Betapa tidak, sekitar lima puluh tahun yang lalu Papua lepas dari cengkraman penindasan kekuasaan Belanda, kemudian dalam proses yang cukup lama Papua berakhir dengan suatu "jajak pendapat" masuk ke dalam rahim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru suasana surgawi hilang kembali ketika tanah Papua digero-goti oleh "*neo kanibalisme*" ala penguasa Indonesia, seperti pelanggaran HAM, marginalisasi, diskriminasi, konflik horizontal dan vertikal, disintegrasi, perlindungan hukum serta kegagalan pembangunan berkaitan dengan UU Otsus (Otonomi Khusus) Papua. Kontroversi permasalahan di Papua ibarat api dalam sekam.

Tidak hanya itu, masalah lainnya adalah separatisme. Sebetulnya ini isu klasik yang selalu muncul dan tenggelam. Gerakan separatis yang selama ini terjadi merupakan sebuah strategi untuk menunjukkan kekecewaan rakyat Papua guna mencari

¹ Koordinator Forum Komunikasi Lintas Iman Provinsi Gorontalo

100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua

perhatian publik agar publik tahu masalah apa yang terjadi di Papua. Hadirnya gerakan separatis justru mengundang Pemerintah untuk menggunakan instrument militer – dengan alasan keamanan – untuk meredakan kondisi yang terjadi di lapangan. Banyak kalangan menilai bahwa penggunaan instrument militer di Papua bukan cara yang efektif dan manusiawi. Justru hal ini semakin memperparah emosi kemarahan masyarakat Papua itu sendiri. Sisi lain, ada kelompok-kelompok orang di luar Papua yang berganda dengan memanas-manaskan kondisi yang ada. Masalah sosial yang begitu banyak tidak mungkin diatasi dengan jalan kekerasan atau menggunakan instrument militer. Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru dan menambah masalah. Lebih buruk lagi kalau ungkapan pendapat dan pernyataan politik sekelompok masyarakat Papua yang disampaikan secara terbuka dengan cara damai, lagi-lagi ditanggapi dengan gertak senjata, penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Pada aspek pembangunan masih kelihatan sangat lambat sehingga mereka merasa dianaktirikan oleh Jakarta. Sarana dan prasarana jalan juga sangat kurang, aspek pendidikan mereka jauh ketinggalan daripada wilayah Indonesia lainnya, apalagi masalah politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial, hingga mereka merasakan terpinggirkan dari warga Indonesia lainnya. Padahal Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun bukan mereka yang menikmatinya.

Dialog Sebuah Solusi untuk Papua

Lagi-lagi dialog adalah solusi terbaik yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian serumpun permasalahan di tanah Papua. Saya ingin mengemukakan dua model dialog dalam konteks masalah Papua yaitu dialog horizontal dan dialog vertikal.

1. Dialog horizontal

Dialog horizontal adalah sebuah dialog yang mempertemukan berbagai komponen masyarakat Papua, Pemerintah Daerah

na yang terjadi di sana
ngundang Pemerintah
ngan alasan keamanan
di lapangan. Bahkan
ment militer di Papua
stru hal ini semata-
Papua itu sendiri. Di
ar Papua mengungkap
yang ada. Masalah
ngkin diatasi dengan
nt militer. Kekerasan
irkan kekerasan ber-
gi kalau ungkapan
k masyarakat Papua
ara damai, lagi-lagi
a, penganiayaan sem-

atan sangat lambat
Jakarta. Sarana dan
didikan mereka juga
ia lainnya, apalagi
n, kebudayaan, dan
osial, hingga mereka
ia lainnya. Padahal
apah, namun bukan

g harus dilakukan
an di tanah Papua
m konteks masalah
al.

ang mempertemu-
emerintah Daerah.

Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua,
Masyarakat Adat, Tokoh-tokoh Agama, dan Barisan
Patriot (BMP) untuk mengakomodasikan harapan-
mereka mengenai cara dan materi dialog. Sebelum dia-
adakan ada komunikasi yang intens dalam bentuk pertemuan,
diskusi, atau apa saja, dan didampingi oleh seorang mediator
yang tidak berpihak pada siapa-siapa.

Kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan
Papua, apakah itu Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau
juga namanya, baik yang berada di dalam negeri
maupun yang di luar negeri, harus mendapat tempat utama
dalam dialog itu. Untuk menjamin terjadinya dialog yang
bermartabat, adil dan benar serta saling menghormati, harus
ada pihak ketiga yang terpercaya untuk menjadi penengah. Atas
nama bentuk pelanggaran HAM yang dialami orang-orang
Papua, Pemerintah harus menegakkan keadilan, meminta maaf,
mengganti rugi dan memulihkan hak-hak orang Papua.

Dialog Vertikal

Dialog vertikal antara masyarakat Papua dengan Penguasa
seringkali diistilahkan dengan "dialog Jakarta-Papua". Dia-
log ini dimaksudkan untuk secara bersama menyepakati akar
masalah. Perundingan harus berjalan atas dasar saling
menghormati, bermartabat, tidak merendahkan, dan tidak
manipulatif. Dan juga, dialog ini digunakan sebagai media yang
disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi politik antara
Jakarta dan Papua. Komunikasi yang intens dalam rangka
mengatasi ketegangan, saling curiga dan saling tidak percaya
antara Jakarta dan Papua. Begitu pula, dialog harus dimulai
dengan strategi, di mana kedua belah pihak tidak memulai
dengan keinginan politik, tapi berfokus kepada penciptaan
kedamaian di Papua. Dialog Jakarta-Papua bukan mendorong
Papua untuk keluar dari bingkai NKRI, akan tetapi membicara-
kan soal kesejahteraan, adat, sosial dan budaya.

Dialog Jakarta-Papua adalah agenda yang harus tetap
dilaksanakan karena pemerintah pusat kelihatannya kurang

serius dalam mengelola Papua untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia masyarakat Papua. Selama ini kekerasan terhadap masyarakat Papua dan pelanggaran hak-hak orang Papua adalah hal yang sudah amat panjang. Jeritan hati orang Papua atas perlakuan itu tidak bisa hanya dianggep sebagai lalat atau dibungkam dengan himbauan dan kebijakan-kebijakan sesaat. Diperlukan keberanian dan tindakan konkrit, Pemerintah Pusat untuk mengubah sikap dan mengambil langkah penyelesaian baru, serta penyelesaian yang berfokus pada kepentingan kesejahteraan dan martabat kehidupan masyarakat Papua.



Peserta Lokakarya Papua Tanah Damai di Sentani, 12-14 Juni 2012